

BAB III

SEJARAH DAN DINAMIKA KONFLIK SUKU MORO DAN PEMERINTAH FILIPINA

A. Suku Moro

Suku moro adalah sebuah suku yang terdapat di Filipina Suku Moro di Mindanao adalah suku etnoreligius yang terdiri atas 13 suku yang mendiami Filipina bagian Filipina selatan. Daerah tempat kelompok ini meliputi bagian selatan Mindanao, kepulauan Sulu, Palawan, Basilan dan beberapa pulau yang bersebelahan. Suku Moro merupakan suku bangsa pelaut yang gigih dan dapat beradaptasi diberbagai tempat mereka berdiam. Sebagian besar mereka berdiam di Mindanao Filipina.

Muslim di Philippina terdiri atas 13 kelompok etnolinguistik, masing-masing Iranun, Magindanaon, Maranao, Tao-Sug, Sama, Yakan, Jama Mapun, Ka'agan, Kalibugan, Sangil, Molbog, Palawani and Badjao. Ada pula muslim di kalangan penduduk pribumi (indigenous people) Mindanao seperti Teduray, Manobo, Bla-an, Higaonon, Subanen, T'boli, dan lain-lain. Selain itu penduduk Muslim juga dapat diketemukan di Luzon maupun Visayas kendati tidakdalam jumlah yang signifikan. Muslim yang mendiami Mindanao, pulau Basilan, Palawan, Sulu dan kepulauan Tawi-Tawi kemudian disebut sebagai Bangsamoro (Lingga, 2004).

Data tahun 2005 menyebutkan total muslim di Philippina berjumlah 5% (4.5 juta jiwa) dari total penduduk Philippina.

Salah Jubair dalam bukunya *Bangsamoro : A Nation Under Endless Tyranny* (1999) menyebutkan bahwa istilah Moro atau Bangsamoro (“bangsa” disini memiliki arti yang sama dengan “bangsa” dalam bahasa Indonesia) adalah istilah yang berasal dari penjajah Spanyol (Spaniards). Sama halnya dengan sebutan etnis lain di Philippina seperti ‘Indio’ dan ‘Filipino’. Kata “Moro” sendiri diadopsi dari bangsa Mauri atau Mauritania di Afrika yang kemudian juga dikenakan kepada bangsa Berbers di Afrika Utara dan juga kepada kaum muslimin yang datang dan menaklukkan Spanyol berabad-abad silam. Maka, istilah Moro akhirnya tidak merujuk kepada kelompok etnis, ras, waktu dan geografis tertentu, namun lebih merujuk kepada kelompok orang yang berafiliasi kepada agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam.

Penyebaran Islam di Sulu dan Mindanao diyakini berasal dari para pedagang, guru-guru dan sufi keturunan Arab yang berlayar hingga ke Sulu dan Mindanao (hampir sama dengan model penyebaran Islam di Indonesia). Mereka kemudian mengislamkan dan menikahi penduduk setempat. Masjid pertama di Philippines tercatat berada di Tubig-Indangan di Pulau Simunul. Didirikan oleh Makhdum Karim alias Sharif Awliya, keturunan Arab, sekitar tahun 1380. Berikutnya para musafir keturunan Arab secara berturut-turut membangun kesultanan Sulu pada 1390, dan kesultanan Maguindanao dan Buayan pada akhir abad ke 15.

Di Mindanao, Sharif Muhammad Kabungsuwan, pendiri kesultanan Maguindanao tiba di Mindanao pada 1515. Ayahnya berasal dari Arab dan ibunya adalah keluarga kesultanan Johor (kini bagian dari Malaysia). Sementara itu, Sultan Sulu ke -7 adalah memiliki darah Brunei (kini Brunei Darussalam).

Kesultanan Makassar dan Ternate masa silam turut memainkan peranan penting di Mindanao. Ketika Gubernur Spanyol Corcuera menyerbu Sulu pada 1638, Rajah Bongsu, Sultan Sulu, mendapat bantuan dari para prajurit Makassar. Sementara itu, kesultanan Ternate kerap membantu Sultan Buisan di Maguindanao dalam perangnya melawan kolonial Spanyol.

Sampai kini masih cukup banyak keturunan Indonesia yang tinggal di Mindanao. Namun kini lebih banyak berasal dari Sulawesi Utara, utamanya kepulauan Sangir Talaud dan Miangas (Pulau Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang berjarak sangat dekat dengan Mindanao dan sebaliknya amat jauh dari Manado). “Saat ini ada sekitar 8000 orang Indonesia yang masih berkewarganegaraan Indonesia di Mindanao. Belum lagi mereka yang tak terdaftar dan mereka yang telah berkewarganegaraan Philippina,” ujar Bernard Loesi, konsul Indonesia di Konsulat Jenderal RI di Davao City.

Tak puas menyebarkan Islam di Mindanao, pergerakan Islam kemudian melaju ke utara, merambah area Visayan, yaitu Cebu, Mactan, kemudian Palawan, hingga Luzon, pulau dimana metropolitan Manila berada. Salah Jubair (1999) mensinyalir bahwa Metropolitan Manila pada abad ke 16 adalah di bawah kekuasaan raja

muslim yaitu Rajah Sulaiman Mahmud. Sama halnya dengan daerah Tondo, Cebu dan Mactan di Visayan.

Datangnya penjajah Spanyol (Spaniards) pada tahun 1521 kemudian mengubah semuanya. Ekspansi dakwah Islam dari Selatan (Mindanao dan Sulu) terhambat dan pertempuran terjadi di banyak tempat selama tiga abad lebih kekuasaan kolonial Spanyol. Perang dengan Spanyol baru mereda pada tahun 1898, yaitu saat beralihnya kekuasaan negeri Philippines dari Spanyol ke Amerika Serikat melalui perjanjian Paris 10 December 1898.

Selain mengenakan istilah “Moro” untuk menyebut kelompok muslim di Mindanao, penjajah Spanyol juga menciptakan istilah Philippines. Pada pertengahan abad ke -16 rombongan ekspedisi Spanyol mendarat di Sarangani Mindanao Selatan dan mencoba untuk membangun pemukiman baru. Namun di daerah baru tersebut mereka berbenturan dengan kemiskinan Bangsamoro sehingga rombongan berbalik pulang. Dalam perjalanan pulang ketika melewati gugus kepulauan Samar-Leyte, Bernardo de la Torre, salah seorang kru kapal, memberikan nama kepulauan tersebut sebagai Filipinas, ntuk menghormati Philip, putra mahkota kerajaan Spanyol ketika itu (di kemudian hari menjadi Raja Philip II). Ketika Amerika Serikat menjajah Filipinas, nama tersebut kemudian di-Inggris-kan menjadi Philippines, sampai saat ini.

Apabila Philippines adalah nama negara, maka Filipino adalah sebutan untuk Spaniards yang lahir di Philippines. Namun sejak tahun 1898 istilah Filipino

dikenakan juga untuk warga pribumi demi menggalang dukungan warga pribumi dalam melawan Amerika Serikat. Belakangan, istilah Filipino ini kemudian mendapatkan ‘nickname’ baru yaitu Pinoy (untuk kaum Pria Filipino) dan Pinay (untuk kaum wanita Filipino)

Warga pribumi Philippines non Moro sebelum 1898 disebut sebagai Indios. Makna “Indios” adalah ‘native’ ataupun “pribumi”. Istilah diskriminatif ala Spaniards kepada penduduk asli Philippina yang bermakna ras yang lebih rendah, primitif dan intelegensia terbatas. Sebenarnya, Indios secara antropologis adalah juga termasuk ras Indo-Malayan sama seperti Bangsamoro. Hanya saja mereka tidak memeluk Islam maka lebih kental dengan sebutan Indios.

Sebaliknya, Bangsamoro tetaplah Bangsamoro hingga kini. Roh Islam Melayu jauh lebih dominan daripada Indios apalagi Spaniards. Secara ras, Bangsamoro adalah ras Indo-Malayan. Ciri-ciri fisiknya amat serupa dengan Indo Malayan lain yang kini bermukim di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand Selatan.

Aksara yang digunakan di Mindanao dan Sulu sebelum datangnya pengaruh kolonial Spanyol adalah dalam huruf Yawi (Arab Melayu). Buku-buku agama ketika itu adalah dalam huruf Yawi, sama halnya dengan tradisi penulisan di Thailand Selatan (Patani) dan juga di kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia masa silam.

Secara Etnolinguistik, semua dialek pribumi Moro, dan juga Luzon serta Visayas, adalah berhubungan

dan memiliki akar yang sama dengan bahasa di rumpun Austronesian/ Malayo Polynesian. Tak heran, kita mudah menemukan banyak kata-kata yang sama antara bahasa Bangsamoro dengan bahasa Indonesia, Melayu-Sumatra, bahkan bahasa Jawa, ataupun Sunda. Kata-kata seperti Tuhan, Raja, bichara, orangkaya, sultan, memiliki makna yang hampir sama dengan kata-kata yang sama dalam bahasa Indonesia.

Penduduk Philipina Selatan, sebagaimana halnya warga Thailand Selatan, sebagian Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, serta sebagian penduduk Indonesia berasal dari rumpun antropologi yang sama yaitu Austronesian / Malayo Polenesian. Maka tak heran jika memiliki kesamaan ciri-ciri fisik dan bahasa yang hampir sama. Dalam bahasa Tagalog (Filipino) yang kini menjadi bahasa nasional Philipine, terdapat kurang lebih 5000 kata-kata yang hampir sama dengan bahasa melayu (Indonesia) walau kadang artinya berbeda. Seperti pintu, kanan, murah, mahal, gunting, aku(ako), kita, balai dan hitungan angka (1 sampai 10) yang amat mirip dengan bahasa Indonesia, Jawa dan Sunda sekaligus.

sayangnya, eksistensi dan status muslim nusantara tersebut tidaklah sama. Muslim menjadi mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Namun menjadi minoritas di Thailand, Singapura, dan Philippina. Memang, menjadi mayoritas tidak menjamin hidup lebih baik, namun terlebih lagi ketika menjadi minoritas. Demikianlah yang terjadi dengan minoritas muslim Moro di Mindanao Philippine

B. Dinamika Konflik

1. Awal Mula Terjadinya Konflik

Di selatan Filipina, konflik masih terus mengintai. Sejak merebak lebih dari enam dekade silam, damai masih menjadi angan-angan bagi sekitar 29 juta orang yang hidup di Kepulauan Mindanao. Kesenjangan, lagi-lagi jadi awal sebab-musababnya. Medio 1950-an, sekitar satu dekade setelah Filipina merdeka, umat Muslim Mindanao masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dahulu, di tanah itu, nenek moyang mereka hidup damai sebelum penjajah Spanyol dan Amerika Serikat yang membawa kebudayaan Kristen menjejakkan kaki. Konflik Mindanao merupakan konflik yang muncul di abad ke 15 dari perlawanan Penduduk Mindanao terhadap kolonialisasi pemerintah Spanyol ketika berhasil menguasai Kepulauan Luzon dan hendak memperluas daerah kekuasaan ke selatan Filipina yakni Mindanao. Kolonialisasi berpindah tangan dari Spanyol ke AS menjelang perang dunia ke II. Perpindahan kolonialisasi menjadi nilai positif karena para *Datus* yang merupakan representasi pemimpin politik dan kebudayaan di Mindanao diberikan ruang untuk mempertahankan budaya Islam yang ada di Mindanao.

Konflik Moro yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan masyarakat muslim Moro bersumber dari konflik antara penjajah kolonial dengan kelompok masyarakat muslim di Filipina Selatan. Filipina telah dua kali mengalami masa penjajahan, pertama dijajah Spanyol dan kedua dijajah Amerika Serikat. Kedatangan penjajah Spanyol dengan program kristenisasinya hanya diterima

oleh masyarakat Filipina tatan, tapi tidak dapat mempengaruhi masyarakat di selatan yang tetap mempertahankan keyakinan agamanya yaitu agama Islam. Perjuangan masyarakat muslim melawan penjajahan ini berkembang menjadi konflik antar agama Islam dan Kristen akibat politik penjajah kolonial yang memanfaatkan masyarakat Filipina Kristen yang telah terpengaruh ajaran Spanyol untuk memerangi masyarakat muslim yang selalu menentang dan memerangi pasukan Spanyol. Konflik antar agama ini terus berlangsung hingga pemerintahan nasional Filipina berkuasa.

Konflik yang sudah berakar ini bersifat perbedaan ideologi jadi sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Konflik yang berbumbu agama ini bisa terjadi dikarenakan spanyol pada masa kolonialisasinya mengkristenisasi penduduk sekitar filipina selatan, yang mana pada awalnya di filipina selatan penduduknya mayoritas beragama muslim merasa terdesak dengan segala diskriminasi yang diberlakukan kolonialisme spanyol pada saat itu.

Pada tahun 1926 mulai terjadi konflik antara pemerintah AS dan penduduk Mindanao disebabkan oleh kebijakan AS yang menggabungkan pemerintah yang berada di Luzon dengan yang ada di Mindanao melalui kebijakan *Bacon Bill*. Kebijakan tersebut menuai protes dari masyarakat dan *datus* di Mindanao namun pemerintah AS tetap melaksanakan kebijakan tersebut dan Filipina merdeka dengan memasukkan wilayah Mindanao sebagai wilayah administratif dari negara Filipina. Kemerdekaan Filipina disambut baik oleh masyarakat Filipina kecuali wilayah Mindanao yang

merasa tidak satu identitas dengan orang Luzon yang non Muslim. Hal ini menyebabkan konflik yang mulai terjadi pada 4 Juli 1946, yaitu terjadi konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Filipina yang ingin mengapus hukum-hukum Islam dan diganti dengan hukum yang berlaku di Filipina.

Selain itu AS juga membuat kebijakan-kebijakan baru yang membuat perjuangan suku Moro semakin berat. Kebijakan, pertama, kebijakan sistem agraria (pertanahan) baru. Di antara bentuk kebijakan pertanahan itu antara lain kebijakan Land Registration Act no. 496 (1902 M) yang menyatakan keharusan mendaftarkan tanah milik pribadi kepada pemerintahan kolonial Amerika dalam bentuk tertulis ditandatangani dan di bawah sumpah. Kemudian kebijakan hukum tanah Philippine Commission Act no.718 tanggal 4 April 1903M, yang menyatakan hibah tanah dari para Sultan, Datuk atau Kepala Suku Non Kristen sebagai tidak sah, jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah. Demikian pula Land Act no.296 diberlakukan 7 Oktober 1903, yang menyatakan semua tanah milik pribadi yang tidak didaftarkan sesuai dengan Land Registration Act no 496, maka status tanah tersebut adalah tanah negara.

Kemudian ada pemberlakuan kebijakan hukum yang sangat memberatkan lagi, yaitu The Mining Law of 1905 yang menyatakan bahwa semua tanah yang telah diakui milik negara di Philipina sebagai tanah yang bebas terbuka untuk dieksplorasi. Kemudian beberapa tahun kemudian muncul pula pemberlakuan kebijakan pertanahan Quino-Recto Collonialization Act no.419

pada 12 Februari 1935, menandai upaya pemerintahan koloni Amerika yang lebih agresif untuk membuka tanah yang dianggap milik negara, dengan kata lain menjajah Mindanao dan Sulu.

Pemerintah berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan survei-survei tanah negara, lalu membuka pemukiman besar di Selatan untuk menampung ribuan pemukiman Kristen, dari wilayah Utara khususnya dibangun di Provinsi Cotabato lama. Bahkan senator Emanuel L. Quezon 1936–1944 mengkampanyekan program pemukiman besar-besaran orang-orang dari proses migrasi orang-orang Utara ke Selatan dengan tujuan menghancurkan homogenitas dan keunggulan bangsa Muslim Moro di Mindanao.

kebijakan Kedua ,koloni Amerika membentuk propinsi Moro Land, dengan alasan untuk memberikan arah pembentukan sistem masyarakat modern (civilizing) bagi bangsa Moro. Akibatnya perlawanan tidak dapat dihindarkan oantara orang muslim melawan koloni Amerika. Menurut Teofisto Guingoana sejak tahun 1914-1920 terjadi 19 kali pertempuran besar yang dilakukan bangsa Moro menolak dua kebijakan tersebut. Perlawanan itu terinspirasi oleh penduduk Moro dengan semangat jihad fi sabillahKetidakmampuan muslim Moro untuk membendung tekanan yang dilakukan Amerika, maka sejak tahun 1920-an itulah seluruh wilayah Selatan Filipina yang berada di bawah kesultanan Mindanao dan Sulu takluk di bawah koloni Amerika dan dikendalikan olehgubernur orang Amerika, kecuali wilayah Lanao Selatan dan Lanao del Sure. Terdapat pula wilayah seperti Sulu, Zamboanga Dan Cotabato

Gubernurnya dipercayakan kepada orang-orang kristen dari wilayah Filipina Utara (Gomez, 1992 38-40) Strategi Amerika meredam perlawanan muslim Moro ternyata tidak cukup efektif, karena itu selain dua kebijakan di atas juga diterapkan pada aspek pendidikan dan penerapan sistem hukum, sehingga norma-norma yang mengikat bagi warga negara cenderung tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seiring Dengan melemahnya perlawanan muslim Moro karena kekuasaan Sulthan semakin berkurang bahkan hilang karena masuknya arus kekuasaan pemerintahan Manila di awah bayang-baynag koloni Amerika. Langkah ini bisa mengancam kekuasaan umat Islam secara bertahap dan berpindah pada kekuasaan pemerintah Manila sehingga kemadirian Muslim Moro semakin tergerus. Ditinjau dari aspek politik, pada masa pemerintahan kolonial Spanyol, Amerika dan pemerintahan Filipina merdeka, tampak adanya tekanan dan pergeseran kekuasaan yang melibatkan gereja, yang dalam waktu bersamaan terjadi proses kristenisasi di wilayah Utara termasuk juga wilayah Selatan yang sebenarnya sejak awal berbasis Islam. Fusi antara peran pemerintahan transisi Amerika-Manila dengan peran gereja katolik, walaupun tak tampak dalam kelembagaan struktural pemerintahan, namun akan tampak jelas bagaimana gereja ikut memainkan peran politik dengan mengatasnamakan upaya integrasi nasional dan secara pelan-pelan menghilangkan peran homogenitas kultural Muslim di wilayah Selatan Filipina.

2. Perjuangan Suku Moro Pasca Kemerdekaan Filipina

Penyerangan terhadap kantor pemerintah Filipina di Manila membuat pemerintah sakit hati dan tidak mau mengakui hukum adat di Mindanao. Sikap tersebut membuat Nur Misuari membentuk MNLF (Moro National Liberation Front) pada tahun 1969 sebagai kelompok pejuang di Mindanao. Kedekatan antara pendiri MNLF dengan pemimpin Libya yaitu Muammar Khadafi ketika itu membuat MNLF memiliki kekuatan dalam melakukan pemberontakan. Kelompok ini dibentuk sebagai gerakan masyarakat Mindanao untuk merdeka dan keluar dari Filipina yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami masyarakat Mindanao dalam hal politik dan ekonomi. Malaysia dan Libya merupakan negara pendukung MNLF dengan memberikan pelatihan kepada militan-militan dan dana kepada MNLF. (Abdullah & Sharon, 1989)

Konflik yang terjadi antara pemerintah dan MNLF akhirnya berujung damai dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah Filipina dan MNLF sebagai perwakilan dari Mindanao yang dimediasi oleh OKI (Organisasi Konferensi Islam). Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Tripoli yang berisi hak-hak otonomi bagi 13 daerah di Mindanao. Perjanjian tersebut tidak berjalan lancar dan juga terjadi perpecahan di kubu MNLF dan muncul MILF (Moro Islamic Liberation Front) pimpinan Salamat Hashim. Hal ini disebabkan karena Salamat Hashim beranggapan bahwa MNLF tidak lagi mewakili Mindanao tapi lebih ke suku Sulu yang merupakan salah satu suku di

Mindanao.pilihan politik Milf yang berkonfrontatif dalam melawan pemerintah Filipina menghasilkan bargaining politik yang kuat dan mendapat banyak bantuan dari negara-negara lain seperti Malaysia dalam hal ekonomi, kemudian pelatihan militer di Afghanistan oleh mujahidin internasional.

Kekuatan kelompok Kristen Filipino berasal dari banyaknya jumlah masyarakat Kristen Filipino di Mindanao yang berasal dari migrasi yang dilakukan selama 20 tahun (1950-1970) yang berdampak dengan keterwakilan Mindanao dalam kongres yang 4 diantara 5 perwakilannya merupakan orang Kristen Filipino. Hal ini membuat masyarakat Mindanao semakin tidak terwakili dan tidak bisa menyampaikan aspirasinya dalam pemerintahan yang memang sudah didominasi oleh orang-orang dari Pulau Luzon di pemerintah pusat dan di Mindanao itu sendiri. Panjangnya konflik yang terjadi di Filipina, membuat presiden-presiden yang pernah berkuasa di Filipina berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut, berbagai macam tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah Filipina baik penggunaan *soft diplomacy* maupun penggunaan militer.

Presiden Ferdinand Marcos yang menjabat tahun 1971-1986 pernah mencapai kesepakatan dengan pihak Mindanao yaitu melalui perjanjian Tripoli tahun 1976 di Libya yang merupakan hasil dari negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Pemimpin Libya ketika itu Muammar Khadafi serta OKI menjadi fasilitator. Perjanjian ini mengalami kegagalan setelah pemerintah Filipina dianggap tidak mengakui atau mentaati isi perjanjian yang telah dibuat dan perjanjian

tersebut pada akhirnya tidak lagi berlaku. Hal ini menimbulkan aksi perlawanan dari MNLF kepada pemerintah Filipina. Presiden Cory Aquino menjadi presiden Filipina dan mencoba melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Negosiasi dilakukan antara pemerintah Filipina dengan MNLF namun mendapat gangguan dari MILF dimana MILF beranggapan bahwa MILF lah yang merupakan kelompok yang paling mewakili Mindanao dan harus diajak negosiasi dengan pemerintah Filipina.

Pada masa pemerintah Cory Aquino dari tahun 1986-1992 menghasilkan perjanjian Jeddah Accord tahun 1987, Cory Aquino digantikan oleh Fidel Ramos (1992-1994) dimana Fidel Ramos kembali meneruskan negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF yang kembali menghasilkan perjanjian antara keduanya dan terjadi konsolidasi antara MNLF dan pemerintah Filipina yang menghasilkan *final peace agreement* (FPA). Fidel Ramos digantikan oleh Estrada. Proses perdamaian yang sudah digagas dan diperjuangkan oleh presiden sebelumnya justru tidak diteruskan dan tidak ditatai oleh presiden Estrada. Sikap *all out war* terhadap MILF justru dibuat oleh Estrada. Pengakuan MNLF sebagai perwakilan Mindanao membuat MILF diserang oleh pemerintah Filipina, pembantaian Jbidah menewaskan 60 orang Muslim Mindanao. Hal tersebut membuat MILF mencari bantuan dari masyarakat Internasional (Surwandono, dinamika penyebab konflik di Mindanao)

Peace proses yang telah dibuat dan dijalankan kembali mengalami kegagalan. Sehingga memunculkan serangkaian aksi perlawanan oleh masyarakat Mindanao

akibat sikap pemerintah Estrada yang menggunakan militer terhadap MILF. Estrada digantikan oleh Gloria Mcapagal Arroyo dimana pada masa pemerintahannya eskalasi konflik di Mindanao Arroyo menggunakan sikap represif sekaligus jalan perundingan dalam masalah Mindanao.